

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGEMBALIAN HUTANG  
HEWAN SAPI DENGAN NILAI YANG BERBEDA**

(Studi Kasus di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten  
Lampung Utara)



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ANISA RAHMAWATI

NPM. 1521030325

Jurusan :Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGEMBALIAN HUTANG  
HEWAN SAPI DENGAN NILAI YANG BERBEDA**

(Studi Kasus di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten  
Lampung Utara)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H.,M.A.**

**Pembimbing II :Frenki, M.Si,**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440/2019 M**

## ABSTRAK

Hutang adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan baik berupa uang, hewan, atau benda lainnya. Seperti hutang hewan sapi yang terjadi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dalam akad hutang hewan sapi yang terjadi pada tahun 2000 setelah melewati 17 tahun ternyata terdapat perubahan nilai/harga dari objek hutang yaitu seekor sapi yang pada akad hutang tahun 2000 senilai Rp. 5.000.000 hingga melewati 17 tahun tersebut tepatnya tahun 2017 sudah berubah menjadi Rp. 10.000.000.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda di desa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda di samping untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengembalian yang dimaksud di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-integratif (penelitian pada lapangan juga pada teori-teori pustaka) dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dalam kualitatif.

Adapun temuan penelitian pertama, bahwa pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, berawal ketika ibu saripah mendatangi bapak karmin untuk berhutang seekor sapi, akad hutang tersebut terjadi di tahun 2000 dengan nilai/harga sapi sebesar Rp. 5.000.000. Kedua, transaksi hutang hewan sapi yang terjadi pada tahun 2000, dan akan dikembalikan tahun 2017 telah mengalami perbedaan nilai/harga yang pada akad awal yaitu Rp. 5.000.000 setelah 17 tahun kemudian meningkat menjadi 10.000.000. Ketiga, perbedaan nilai yang terjadi pada objek hutang tersebut menurut pendapat yang merupakan keputusan Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami (divisi fikih rabithah alam Islam) bahwa kenaikan serta penurunan daya beli uang bukan karena kelalaian orang yang berhutang. Dan menurut pendapat ulama syafiiyah bahwa akad hutang piutang dilarang mengambil keuntungan yang dipersyaratkan, sedangkan dalam akad hutang hewan sapi tersebut tidak terdapat syarat. Oleh karena itu, jika pengembalian hutang hewan sapi dikembalikan dengan nilai/harga setelah 17 tahun kemudian maka dibolehkan karena tidak dipersyaratkan sebelumnya dan bukan menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Hutang Hewan Ternak, Nilai yang Berbeda, Hukum Islam



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENGEMBALIAN HUTANG HEWAN SAPI  
DENGAN NILAI YANG BERBEDA (Studi Kasus  
di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara  
Kabupaten Lampung Utara)**  
**Nama : ANISA RAHMAWATI**  
**NPM : 1521030325**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Jurusan : Mu'amalah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP. 196003291987031003**

**Pembimbing II**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011024**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H**  
**NIP. 19720826200312100**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengembalian Hutang Hewan Sapi Dengan Nilai Yang Berbeda (Studi Kasus di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)**, disusun oleh **Anisa Rahmawati, Npm 1521030325, Jurusan Muamalah.** Telah diujikan dalam sidang **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal Juma'at/14 Juni 2019 Ruang Sidang IV Fakultas Syari'ah.

**TIM MUNAQSAH**

**Ketua : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.**

**Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

**Penguji I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag, M.Ag.**

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*“Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S Al-Maidah (5): 2)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Muhari yang selalu memberikan support dan pengorbanan semasa hidupnya dan ibunda Sukarni yang selalu memberikan nasihat tiada henti, serta limpahan kasih sayang kalian berdua dan dukungan juga do'a yang selalu dipanjatkan untukku.
2. Kakakku Arif Gunawan dan Rika Sugiarti S.Pd terimakasih selalu memberikan semangat tiada henti serta doa dan dukunganmu.
3. Rudi Ariono terimakasih untuk support serta doa yang selalu ditujukan kepadaku.
4. Seluruh keluarga besar kakekku Alm. Kaspin dan Nenekku Almh. Sarinem yang sangat saya cintai, berkat doa serta dukungan dari keluarga besar hingga saya mampu menyelesaikan studi ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Anisa Rahmawati, dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1996 di Negara Ratu. Anak kedua dari Bapak Muhari dan Ibu Sukarni. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. TK Cindelaras Pasar Senin Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2002.
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2008.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2011.
4. Madrasah Aliyah Negeri Padang Ratu Kecamatan sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2014.
5. Melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) pada fakultas syariah.

## **KATA PENGANTAR**



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengembalian Hutang Hewan Ternak Dengan Nilai Yang Berbeda” (Studi Kasus Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara) dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikut-Nya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan IPTEK serta di Ridhoi Allah SWT yaitu dengan Islam. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Dr. H.A Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H, selaku ketua jurusan Muamalah dan Khoiruddin, M.SI., selaku sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
4. Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing I dan Frenki M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Sahabat-sahabatku jajaran anak bunshay Dila Martanti, Wiwit Ayu Ningsih, Nurul Amalia, Ade Mareta Handayani, serta sesepuh Muamalah kelas B Etika Yolani Melati, Siti Maesaroh, Saiful Nugraha, M. Abdul Aziz, Agung Tri Pratama, Anis Faizah, Yeyen dan seluruh anggota Muamalah kelas B angkatan 2015.
8. Teman-teman seangkatan selama 40 hari KKN Palas khususnya Pematang Baru 1, terimakasih sudah kebersamaan selama 40 hari dan akan terus menjalin tali ukhuwah Islamiah selamanya.
9. Teman-teman praktik peradilan semu metro kelompok 7, terimakasih sudah memberikan berbagai keringanan pada seluruh anggota kelompok.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2015 terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung;
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Akhirnya, dengan iringan terima kasih dan memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari

Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penyusun khususnya umat Islam di dunia, dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan Hukum Islam. Amiin.

Bandar Lampung, Juni 2019  
Penulis

**Anisa Rahmawati**  
NPM. 1521030325



## DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM .....	ii
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih sJudul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8

### BAB II LANDASAN TEORITIS ..... 15

A. Pengertian Hutang Piutang .....	15
B. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	18
C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	26
D. Prinsip-Prinsip Hutang Piutang .....	28

E. Barang yang Dbolehkan Akad Hutang Piutang.....	31
F. Faktor Pendorong Melakukan Hutang Piutang .....	32
G. Dampak Negatif dan Positif Hutang Piutang .....	35
H. Hukum Hutang yang Mendatangkan Keuntungan .....	38

### **BAB III HUTANG PIUTANG DI DESA NEGARA RATU KECAMATAN SUNKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA..... 45**

A.Kondisi Geografis .....	45
B.Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	58
C.Praktik Hutang Hewan Sapi di Desa Negara Ratu Kecamatan SungkaiUtara Kabupaten Lampung Utara .....	60

### **BAB IV ANALISIS DATA..... 69**

A.Praktik Hutang Hewan sapi dan Pengembaliannya dengan Nilai yang Berbeda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara .....	69
B.Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Hutang Hewan Sapi dengan Nilai yang Berbeda.....	74

### **BAB V PENUTUP..... 82**

A.Kesimpulan.....	82
B.Saran.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal akan dijelaskan secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan isi skripsi ini. Skripsi ini berjudul tinjauan hukum Islam tentang pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda.

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup> Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban). Tinjauan hukum Islam adalah proses menyelidiki atau mempelajari seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul.

Pengembalian berasal dari kata “kembali” yang berarti proses, cara, perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan.<sup>2</sup> Hutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup> Pengembalian hutang adalah perbuatan mengembalikan sesuatu kepada orang lain baik berupa uang atau benda

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 49.

<sup>3</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2015), h. 123.

lainnya. Hewan adalah binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi.<sup>4</sup> Nilai merupakan harga atau taksiran harga.

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas maka yang dimaksud penelitian skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda (Studi Kasus Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara), dalam penelitian ini terdapat usaha untuk mengetahui dengan jelas tentang praktik pengembalian hutang hewan ternak dengan nilai yang berbeda dan bagaimana pandangan hukum Islam sebagaimana yang terjadi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Kegiatan hutang piutang hewan sapi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang dibayarkan dengan nilai yang berbeda yang menimbulkan perdebatan di masyarakat, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut melalui sudut pandang hukum Islam.

### **2. Alasan Subjektif**

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 1330.

### C. Latar Belakang Masalah

Kegiatan hutang piutang secara umum ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan mengembalikan dengan nilai yang sama. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan berkonotasi pada uang atau barang yang dipinjamkan dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan sama. Di lain sisi hutang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Sementara hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>5</sup> Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

Menurut hukum Islam hutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati, dimana orang

---

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), h. 451.

yang diberi hutang harus mengembalikan uang atau benda yang di hutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut pengertian lain hutang ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.<sup>7</sup> Pinjaman tersebut dapat berbentuk uang, perabotan atau hingga hewan ternak sampai waktu tertentu. Dalam perkara hutang, seseorang harus mengembalikan kepada orang yang memberikan hutang pada waktunya apabila waktu tersebut telah disepakati.

Memberikan hutang hukumnya sunnah bahkan dapat menjadi wajib bila mengutangi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan, dengan ketentuan tidak mengutangnya dengan perjanjian melebihi pembayaran hutang. Tetapi kelebihan bayaran itu hanya kemauan dan keikhlasan dari yang berhutang.<sup>8</sup> Hukum hutang piutang dapat berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya.<sup>9</sup> Sementara ijma' ulama menyepakati bahwa hutang boleh dilakukan. Karena kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan oleh karena itu, pinjam-

---

<sup>6</sup> Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*,h. 123.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), h. 178.

<sup>8</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah* (Bandung : Angkasa Bandung,2005), h.213.

<sup>9</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.231.

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini.<sup>10</sup> Seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat: 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>11</sup>

Penafsiran ayat tersebut yang terpenting adanya unsur tolong-menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dan ketaatan, maka dalam hal hutang-piutang dan pada saat proses pembayaran hendaknya tidak merugikan salah satu pihak. Hutang piutang merupakan transaksi muamalah yang dibolehkan dan akad dalam hutang piutang termasuk ke dalam akad *tabarru'* (akad tolong-menolong), karena di dalamnya terdapat unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan oleh sebab itu *muqridh* (orang yang memberi hutang) berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera dalam persoalan pembayaran hutang.<sup>12</sup> Meskipun *muqridh* (orang yang memberi hutang) terdapat hak untuk meminta pengembalian hutang tersebut bukan berarti orang yang memberi hutang berhak pula atas tambahan dalam hutang terlebih lagi jika tambahan tersebut sudah disepakati sejak awal. Akad dalam hutang piutang menggunakan akad *tabarru'* (akad tolong-

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 178.

<sup>11</sup> Q.S Al-Maidah (5): 2.

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 236.



menolong) yang mempunyai arti yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba, transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Melainkan, dalam akad *tabarru'* (akad tolong-menolong) tujuannya melakukan tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* (akad tolong-menolong) pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, imbalan dari akad *tabarru'* (akad tolong-menolong) adalah dari Allah SWT.

Salah satu kegiatan hutang piutang terjadi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yaitu hutang berupa seekor hewan sapi yang akadnya terjadi pada tahun 2000 dan setelah melewati 17 tahun hutang tersebut akan dikembalikan tepatnya pada tahun 2017, secara tidak langsung harga hewan sapi tersebut sudah tidak sama dengan harga pertama pada saat hutang hewan ternak terjadi.

Permasalahan hutang terjadi ketika adanya ketidakstabilan harga, seperti halnya hewan sapi yang pertahunnya mengalami perubahan harga, ketika seseorang berhutang hewan ternak seperti sapi dan akan mengembalikan hutang tersebut dengan kurun waktu yang sudah cukup lama dari proses awal hutang maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, jika dalam satu tahun hewan ternak tersebut telah berubah harganya dari harga semula, dan orang yang diberi pinjaman hutang tersebut mengembalikan hutang hewan ternak berlipat ganda dari harga semula. Kedua, jika pada saat proses pengembalian hutang hewan ternak tersebut

harganya mengalami penurunan maka orang yang memberi pinjaman hutang akan mengalami kerugian dari hutang pada awalnya.

Berdasarkan saat akad hutang tersebut terjadi atau kesepakatan awal terjadinya hutang yang nantinya dapat menjadi patokan pada saat proses pengembalian hutang hewan sapi tersebut. Apakah dengan membayar pada pilihan yang kedua yaitu menyesuaikan harga hewan ternak yang sedang berlaku dipasaran, atau tetap mengacu pada jumlah hutang pada asalnya.

Praktik hutang hewan sapi semacam ini yang terjadi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, perlu diteliti lebih lanjut karena masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Untuk itu kemudian mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Pengembalian Hutang Hewan Sapi dengan Nilai yang Berbeda (Studi Kasus Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara).

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian mempunyai tiga macam tujuan yaitu: penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data dari penelitian yang dimulai dari permasalahan sampai temuan adalah benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah ada. Pembuktian berarti penelitian sampai hasil atau temuan penelitian bersifat menguji atau membuktikan jika hasil penelitian masih relevan jika dilakukan di tempat lain, atau dalam waktu berbeda. Pengembangan berarti tujuan penelitian ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada.<sup>13</sup>

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya dalam permasalahan praktik pengembalian hutang hewan ternak dengan nilai yang berbeda.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai pembelajaran bagi pihak-pihak terkait di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan

---

<sup>13</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 3.

pengertian atas topik, gejala tertentu. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif integratif (penelitian yang dilakukan pada kepustakaan dan juga lapangan).<sup>14</sup> dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>15</sup> Pada hakikatnya penelitian lapangan dilakukan dengan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu dan memberi gambaran realitas yang terjadi di masyarakat.

Menurut hal ini peneliti akan langsung melakukan pengamatan terhadap pengembalian hutang hewan ternak dengan nilai yang berbeda tersebut. Selain lapangan peneliti juga akan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang terdapat di perpustakaan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Data yang dikumpulkan berupa gambaran, dan bukan angka-angka.<sup>16</sup> Dalam hal

---

<sup>14</sup> Akh. Minhaji, *Strategies For Social Research: The Methodological Imagination In Islamic Studies* (Yogyakarta: CV Sukses Offset, 2009), h. 47.

<sup>15</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h.10.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 6.

ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan pengembalian hutang hewan ternak dengan nilai yang berbeda, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang peneliti teliti

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data lapangan, yang memiliki fokus penelitian pada penentuan hukum dari pengembalian hutang hewan ternak dengan nilai yang berbeda. Maka dari itu data yang digunakan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun sumber data primernya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang menjadi objek penelitian diantaranya: orang yang terlibat langsung dalam proses hutang hewan ternak, masyarakat, tokoh masyarakat dan ulama pondok pesantren.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekundernya yaitu buku-buku yang terkait dengan hutang-piutang, fikih muamalah, al-Qur'an, dan hadist.



#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup> Jadi populasi bukan hanya orang tetapi obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek dan subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>18</sup> Untuk tehnik samplingnya peneliti menggunakan purposive sampling yaitu salah satu tehnik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai degan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini sampel diambil dari 2 orang yang terlibat langsung dalam proses

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 81.

hutang tersebut, serta beberapa orang tokoh masyarakat, tokoh agama dan ulama pondok pesantren di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) oleh karena itu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambar realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya

tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur melalui tatap muka maupun dengan media lainnya.<sup>19</sup> Wawancara juga merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis, dalam penelitian ini, data-data yang didapat melalui dokumen-dokumen kemudian dikumpulkan dan diolah supaya relevan dengan objek penelitian. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas ruang dan waktu sehingga member peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

6. Metode pengolahan Data

Setelah data relevan dengan judul dan terkumpul, kemudian data diolah dengan cara :

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang dikumpulkan itu tidak logis dan meragukan.<sup>20</sup>

b. Sistemating

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 138.

<sup>20</sup> Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.

Sistematic adalah melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang diperoleh.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain supaya peneliti dapat menyajikan temuannya

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, dengan menggunakan metode analisa data yang sesuai dengan kajian penelitian. Metode berfikir yang digunakan yaitu metode induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 4.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Hutang Piutang

Hutang (*al-Qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.<sup>22</sup> Menurut bahasa *al-Qradhu* ialah potongan, sedang menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.

Wahbah Zuhaili Az-Zuhaili mendefinisikan *qardh* (hutang piutang) menurut bahasa adalah *al-qath* yang berarti harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).<sup>23</sup>

Mazhab-mazhab lain mendefinisikan *qardh* (hutang piutang) sebagai bentuk dari pemberian harta atau benda lainnya melalui seorang kreditur kepada seorang debitur yang nantinya akan diganti dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya debitur, harta tersebut dapat berupa harta *mitsli* (harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, hewan dan barang dagangan).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), h. 177.

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz. 5 terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 373.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 374



Golongan Hanafiyah berpendapat *qardh* adalah

عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَا لِمِثْلِيٍّ لِأَخَرٍ لِيَرُدَّ مِثْلُهُ<sup>25</sup>

Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.

Golongan Syafi'iyah menjelaskan *qardh* sebagai pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Sedangkan Hanabilah mengemukakan *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.

Menurut Sayyid Sabiq *qard* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar.<sup>26</sup>

Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.

Adapun yang dimaksud hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.<sup>27</sup> Kata sesuatu yang dimaksud oleh definisi ini adalah mempunyai makna yang luas, dalam arti dapat berbentuk uang atau barang yang selama barang tersebut habis dalam pemakaian. Jelasnya

---

<sup>25</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 229.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 230.

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 136.

*qardh* (utang piutang) adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hutang piutang, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, Antara lain :

- a. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

Dalilnya firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.*<sup>28</sup>

- b. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan pada saat awal hutang terjadi.
- c. Hendaknya hutang piutang dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- d. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Bila pihak yang berhutang tidak mampu

---

<sup>28</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

mengembalikannya, maka pihak yang berpiutang hendaknya memberi keringan.

- e. Pihak yang berhutang apabila sudah mampu membayar hutang tersebut, hendaknya dipercepat pembayarannya karena lalai dalam membayar hutang berarti berbuat zalim.<sup>29</sup>

Pada dasarnya dalam bertransaksi yang dilaksanakan idealnya harus tercatat supaya terdapat pegangan diantara pihak yang bertransaksi sebagai bukti otentik. Pada era sekarang ini, sering terjadi permasalahan dikarenakan tidak ada bukti tertulis, sehingga pihak yang bertransaksi saling menyangkal hal ini memungkinkan karena memiliki nilai yang menguntungkan pada salah satu pihak sehingga ada pihak yang dirugikan.

## **B. Dasar Hukum Hutang Piutang**

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa. Sebagaimana yang menjadi dasar hukum hutang piutang dapat ditemui dalam al-Qur'an dan Hadist. Dalam ketentuan al-Qur'an dapat ditemui anjuran Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak ”.*<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 98.

<sup>30</sup> Q.S. Al-Hadid (57): 11.

Utang piutang dibolehkan dalam Islam berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرة وَاللَّهُ يَقبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرجعون.

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*<sup>31</sup>

Disebutkan juga dalam dalam beberapa surat seperti surat Al-Baqarah ayat 280, Al-Baqarah ayat 282, Al-Baqarah ayat 283, dan At-Taubah ayat 60. Berikut bunyi surat-surat tersebut:

Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*<sup>32</sup>

Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu*

<sup>31</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 245.

<sup>32</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 280.

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>33</sup>

Surah Al-Baqarah 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَفْنِ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>34</sup>

Surat An-nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَ تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا  
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak laki sama dengan dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,

<sup>33</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

<sup>34</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 283.

maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Seseungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>35</sup>

Surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.<sup>36</sup>

Dalam QS Al-Maidah ayat 2 juga disebutkan:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۲ ﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

<sup>35</sup> Q.S. An-Nisa (4): 11.

<sup>36</sup> Q.S. At-Taubah (9): 60.

*pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>37</sup>

Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari serangkaian ayat suci di atas. Di ayat yang pertama ditegaskan mengenai perintah meninggalkan riba dan ancaman bagi siapapun yang tetap mengambilnya. Ayat yang kedua mengajari kita agar berlaku lunak kepada orang yang berhutang. Ayat yang ketiga memerintah kaum mukminin agar menuliskan transaksi hutang-piutang serta menghadirkan saksi untuknya. Ayat yang keempat berbicara mengenai jaminan hutang dan ayat keenam menunjukkan sasaran pembagian zakat.<sup>38</sup>

Bahkan dalam hadist disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يَرْيدُ أَداءً هَآؤُلَئِكَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يَرْيدُ إِتْلًا فَهِيَ أَتْلَفَهُ اللَّهُ.  
(رواه البخارى)

*Dari Abu Hurairah r.a Nabi Saw bersabda: “siapa yang berhutang dengan maksud membayarnya kembali, Tuhan akan menolongnya dalam membayar kembali. Siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud untuk menghilangkannya, Tuhan akan menolong menghilangkannya”. (Riwayat Imam Bukhari)*<sup>39</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَدَّ اِئِنَّ النَّاسَ فَكَأَن يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَا وَزَعْنَهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَا وَزُعْنَا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ

---

<sup>37</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 2.

<sup>38</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012), h. 239.

<sup>39</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, Jilid III Terjemahan Zainuddin Hamidy dkk (Jakarta: PT Bumirestu, 1992), h. 20.



عَنْهُ حَدَّثَنِي حَزْرَ مَلَّةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَ نِي يُوسُفُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ . (رواه المسلم)

*Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: ada seorang laki-laki yang suka menghutangi orang-orang, lalu dia berkata kepada pelayannya, 'jika seorang yang kesusahan datang kepadamu maka berilah kemudahan kepadanya, semoga Allah memberi kemudahan kepada kita.' Kemudian bertemu Allah (meninggal), maka Allah pun member kemudahan kepadanya. Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa 'Ubaidillah bin Utbah' telah menceritakan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata saya mendengar Rasulullah Saw bersabda seperti itu. (Riwayat Imam Muslim)<sup>40</sup>*

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ (رواه المسلم)

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan jika tagihan piutang salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang kaya maka terimalah. (Riwayat Imam Muslim)<sup>41</sup>*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا , فَقَدَمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبًّا عِيًّا, فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه المسلم)

*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shodaqoh. Beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, "saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun" beliau menjawab,*

<sup>40</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Kitab Shahih Muslim*, Juz IV Terjemahan Abd. Rasyid Shiddiq dkk (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), h. 2922.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 2924.

*“berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. (Riwayat Imam Muslim)”<sup>42</sup>*

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama telah ijma’ tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* (hutang piutang) sunnat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi hutang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

Hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi hutang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan).<sup>43</sup> Secara umum hutang piutang adalah mubah atau boleh, Namun terdapat beberapa hukum pinjaman hutang piutang (*al-qardhu*). Hukum-hukum tersebut diantaranya:<sup>44</sup>

- a. *Al-qardhu* (hutang piutang) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *mustaqridh* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. *Al-qardhu* (hutang piutang) boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqtaridh* (debitur).
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu, namun jika telah

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 3002.

<sup>43</sup> Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : Publishingnet, 2015), h. 124.

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.* h.179.

mengalami perubahan, kurang, atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.

- d. Jika pengembalian *al-qardhu* (hutang piutang) tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar ditempat mana pun yang diinginkan *muqridh* (kreditur).
- e. *Muqridh* (kreditur) haram mengambil manfaat dari *al-qardhu* (hutang piutang) dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>45</sup> Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari *muqtaridh* (debitur) maka dibolehkan.

Terdapat hukum lain dalam memberi hutang piutang yang bersifat lebih fleksibel tergantung situasi dan kondisi, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Hukum orang yang berhutang adalah mubah (boleh) sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya.
- b. Hukum orang yang berhutang menjadi sunnah dan hukum orang yang mengutangi menjadi wajib, jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Suharyanto Arby, Hukum Hutang dalam Islam dan Dalilnya (On-line), tersedia di: <https://Hukum-Hutang-Piutang-dalam-Islam-dan-Dalilnya-DalamIslam.com> (1 november 2018). Diakses 10 Maret 2019 Pukul 08:58 WIB.

kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya.

- c. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk berjudi, membeli minuman keras dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist, dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*<sup>47</sup>

### C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

1. Syarat-syarat utang adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>
  - a. Besarnya *al-Qardhu* (hutang piutang) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya. Agar diketahui dengan jelas pengembalian dan tidak ada *gharar* (ketidakjelasan).
  - b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk harta *mitsli* (harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya) Namun, jumhur ulama

---

<sup>47</sup> Q.S. Al-Maidah (5); 2.

<sup>48</sup> Ismail Nawawi. *Op.Cit.*, h. 178.

membolehkan dengan harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan, seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

2. Sementara rukunnya adalah sebagai berikut :

a. Pemilik barang yang dihutang (*muqridh*)

Menurut hal ini orang yang memberi hutang disyaratkan harus cakap dalam melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal), serta atas kehendak sendiri. Dengan adanya syarat baligh dan berakal, berarti anak kecil tidak memenuhi syarat untuk berhutang, karena anak kecil belum baligh. Meskipun demikian, terdapat perinciannya:<sup>49</sup>

- 1) Jika anak kecil belum *tamyiz* (bisa membedakan baik dan buruk), utangnya tidak sah secara mutlak.
- 2) Jika anak kecil sudah *tamyiz*, dia boleh melakukan transaksi berhutang namun untuk jumlah yang sedikit.

b. Peminjam hutang (*muqtaridh*)

Menurut hal ini orang yang berhutang atau yang mendapat pinjaman barang diisyaratkan harus cakap dalam melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal).

---

<sup>49</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Fikih Muamalah "Taubat Dari Hutang Riba Dan Solusinya"* (Yogyakarta: CV Rumaysho, 2017), h. 107.

c. Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, Sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan. Barang yang dipinjamkan haruslah barang pemilik orang yang memberi pinjaman, berarti orang yang bukan pemilik harta atau barang yang dipinjamkan tidak memenuhi syarat untuk berhutang. Jika ada orang yang ingin memberikan pinjaman dengan menggunakan harta orang lain, harus mendapat izin dari pemilik harta terlebih dahulu.<sup>50</sup>

d. Serah terima (ijab kabul)

Ijab qabul yaitu pernyataan dari pihak yang memberi utang dan pihak yang berhutang yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dbolehkan apabila dalam akad *qardh* (hutang piutang) terdapat kesepakatan guna mempertegas hak milik, seperti syarat adanya barang jaminan, saksi, bukti tertulis atau pengakuan dihadapan hakim.

#### D. Prinsip-Prinsip Hutang Piutang

1. Islam hanya mengenal adanya *qardh hasanah* (hutang kebajikan). Hutang boleh berbentuk apa saja yakni uang atau barang, besar maupun kecil. Untuk keperluan pribadi maupun bisnis, tetapi hutang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 108.

itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Karena bunga telah dilarang dalam Islam maka ia tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apapun juga.<sup>51</sup>

2. Tidak dibenarkan adanya hutang kecuali keadaan mendesak. Berhutang dengan tujuan memenuhi kehidupan mewah dan boros, tidak diperbolehkan. Hanyalah boleh hutang itu diberikan jika orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
3. Karena perjanjian verbal mengenai hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan, dan masalah hukum, maka kitab suci Islam mewajibkan kedua belah pihak, *muqtaridh* (orang yang berhutang) maupun *muqridh* (orang yang memberi hutang), melakukan kontrak hutang dengan tertulis dipersaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya. Penulis haruslah menulis sesuai dengan yang didiktekan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) dan jika *muqridh* (orang yang memberi hutang) lemah akal atau di bawah umur, dibantu oleh walinya. Jika hutang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ditemukan seorang penulis perjanjian, maka *muqtaridh* (orang yang berhutang) harus memberi jaminan dari hartanya kepada *muqridh* (orang yang memberi hutang). Baik penulis maupun saksi wajib berlaku jujur dalam menulis maupun dalam memberi bukti, sedangkan *muqtaridh* (orang yang berhutang) dan

---

<sup>51</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Op.Cit.*, h. 245



*muqridh* (orang yang memberi hutang) pun haram saling merugikan dengan cara apapun juga.

4. Pemberi pinjaman hutang atau *muqridh* (orang yang memberi hutang) boleh meminta jaminan dalam bentuk asset ataupun harta dari *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebagai jaminan pelunasan hutang. Secara teknis yang disebut gadai (*Rahn*).<sup>52</sup> Namun, dalam hutang piutang dilarang mencari keuntungan dari harta yang dihutangkan.
5. Pelunasan hutang adalah hal yang menjadi prioritas sebelum harta apabila orang yang meninggal akan membagi hartanya kepada para ahli waris.
6. Pelunasan hutang yang melebihi jumlah termasuk halal, selama tidak diperjanjikan diawal dan atas keikhlasan dari *muqtaridh* (orang yang berhutang).
7. Hutang haruslah dilakukan dengan niat akan membayarnya.
8. *Muqridh* (orang yang memberi hutang) berhak menggunakan kata-kata yang keras kepada *muqtaridh* (orang yang berhutang) yang tidak mengembalikan hutangnya. Bahkan *muqtaridh* (orang yang berhutang) dapat dipenjara oleh pengadilan karena tidak membayar hutangnya ketika upaya *muqridh* (orang yang memberi hutang) sudah gagal dalam menagih hutang tersebut.
9. Jika seorang *muqtaridh* (orang yang berhutang) dalam keadaan susah dan serba kekurangan maka *muqridh* (orang yang memberi hutang)

---

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 247.

hendaklah menunda penagihannya hingga posisi finansial *muqtaridh* (orang yang berhutang) memungkinkan untuk mengembalikan hutangnya.

10. Seorang *muqtaridh* (orang yang berhutang) berhak menerima zakat untuk meringankan beban hutangnya. Negara Islam wajib menolong *muqtaridh* (orang yang berhutang) dengan penerimaan zakatnya, karena membebaskan *muqtaridh* (orang yang berhutang) dari kewajiban hutangnya adalah salah satu sebab ditetapkan Al-Qur'an bagi pengumpulan zakat.
11. Membebaskan *muqtaridh* (orang yang berhutang) miskin adalah perbuatan yang amat terpuji yang akan mendapat pahala besar.
12. Jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan pula sisa hutang yang belum terbayar serta tidak punya harta untuk membayar hutang itu, maka negara Islam bertanggung jawab membayar hutang itu jika negara memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya.<sup>53</sup>

#### **E. Barang yang Dbolehkan Akad Hutang Piutang**

Adapun harta yang dbolehkan menurut klasifikasi secara khusus sebagai berikut:

1. Harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak berbeda

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 248

antara satu dengan yang lain seperti telur, kelapa dan kertas satu ukuran dan yang diukur seperti kain.<sup>54</sup>

2. Harta *qimiyyat* yaitu harta yang dihitung berdasarkan nilainya seperti hewan, kayu bakar dan property. Begitu juga barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya, hal ini karena sulit mengembalikan harta semisalnya.

Menurut Jumhur Ulama, akad *qardh* (hutang piutang) sah dilaksanakan baik pada harta *mitsli* maupun *qimiyyat*. Begitu juga tidak sah *qardh* (hutang piutang) pada benda yang tidak bisa ditetapkan menjadi tanggungan, seperti tanah, gedung, toko dan kebun, karena *qardh* (hutang piutang) menuntut adanya pengembalian benda semisal dan benda-benda tersebut tidak ada semisalnya.<sup>55</sup>

## **F. Faktor Pendorong Melakukan Hutang**

Pada dasarnya tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Demikianlah sebagaimana keadaan manusia yang Allah tetapkan, ada yang dilapangkan hartanya hingga melimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dan mendorongnya untuk

---

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili az-Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 377.

<sup>55</sup> *Ibid.*

berhutang atau mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu membantunya.

Menurut ajaran Islam hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan. Tapi diharuskan ekstra hati-hati dalam menerapkannya, hutang dapat menimbulkan suatu kewajiban yaitu kewajiban membayar. Secara umum interpretasi terhadap terjadinya hutang cenderung pada konsep ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor seseorang melakukan hutang piutang, antara lain :

1. Keadaan ekonomi yang memaksa seseorang untuk berhutang

Pada dasarnya hukum hutang piutang dalam Islam adalah boleh terutama dalam keadaan ekonomi yang darurat. Meskipun agama tidak melarang transaksi hutang namun hutang telah menjadi pilihan perilaku ekonomi masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>56</sup>

2. Kebiasaan berhutang

Perilaku berhutang dapat diukur melalui itensi atau niat seseorang terhadap keputusan berhutang dan sikap merupakan salah satu alasan yang penting dalam berniat melakukan suatu hal termasuk berhutang.<sup>57</sup>

Kebiasaan berhutang, meski tidak dalam keadaan darurat justru akan memberikan dampak buruk terutama jika hutang tersebut tidak

---

<sup>56</sup>Muhammad Shohib, "Sikap Terhadap Uang dan Perilaku Berhutang", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 03 No. 01 (Januari 2015), h. 133. Diakses 01 November 2018 Pukul 11:16 WIB.

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 136.

sempat untuk dilunasi karena yang berhutang lebih dulu meninggal dunia.

3. Memiliki rasa ingin menikmati kemewahan yang belum bisa dicapai

Berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nomor tiga yaitu papan sangatlah kurang dianjurkan. Karena tak ada alasan yang membenarkan untuk berhutang karena tujuan yang haram atau bermewah-mewah.

4. Hutang merupakan alternatif terakhir

Ketika segala usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai namun tetap mengalami kebuntuan. Keterbatasan seperti inilah yang dibolehkan memilih jalan berhutang.<sup>58</sup>

5. Gaya hidup yang harus dipenuhi

Ketika pendapatan dan status ekonomi yang rendah membuat hutang menjadi alternatif atau pilihan bagi masyarakat umumnya. Meskipun sebagian orang beranggapan bahwa berhutang adalah sebuah beban tetapi tidak sedikit orang yang memaknai hutang sebagai motivasi untuk mencari rupiah dalam pekerjaannya. Sehingga hutang menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus.

6. Faktor terbesar seseorang melakukan hutang piutang merupakan faktor ekonomi

Terdapat alasan lain yang menyebabkan terjadinya hutang piutang yaitu karena adanya dorongan dari diri pribadi untuk

---

<sup>58</sup>Abdul Aziz Ramdanyah, Esensi Utang dalam Konsep ekonomi Islam, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 1 (Juni 2016), h. 133. Diakses 16 November 2018 Pukul 18:41 WIB.

mengedepankan keinginannya tersebut. Keinginan tersebut tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan tetapi juga gengsi dan sosialisasi, yang pada akhirnya hanya sebagai faktor kepuasan semata dan hanya digunakan sebagai suatu kesenangan sehingga dilakukan berulang.

#### **G. Dampak Negatif dan Positif Hutang Piutang**

Prilaku berhutang telah banyak menjadi pilihan individu dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan. Prilaku berhutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Pada dasarnya hutang piutang memiliki berbagai dampak seperti negatif dan positif, berikut dampaknya:

##### **1. Dampak positif**

- a. Hutang piutang sebagai bentuk tolong-menolong, dalam Islam tolong menolong tentu dibolehkan dan hukumnya mubah. Dengan niat tolong-menolong maka orang yang memberi hutang sudah mempermudah segala urusan orang yang berhutang.
- b. Mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah, apabila niat memberi hutang piutang tersebut diniatkan untuk menolong sesamanya. Selain itu disebutkan dalam ayat lain bahwa memberikan pinjaman yang baik akan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

- c. Dihitung telah bersedekah. Karena orang yang memberi hutang dianggap telah menolong orang yang berhutang yaitu dengan cara meminjamkan benda atau hartanya kepada orang yang berhutang.
- d. Menghilangkan kesukaran, siapapun umat muslim yang memberikan pinjaman dalam bentuk hutang piutang yang sifatnya baik dan menolong orang lain maka ia juga akan mendapatkan hal yang sama yakni dihilangkan kesukarannya.
- e. Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan serta memiliki kebutuhan yang mendesak.<sup>59</sup>

## 2. Dampak Negatif

- a. Seseorang yang memiliki kebiasaan berhutang terlebih berhutang untuk sesuatu yang sia-sia, maka secara tidak langsung dapat merusak akhlak seseorang.
- b. Orang yang berhutang apabila berkata ia berdusta apabila berjanji ia mengingkari, hal tersebut dilakukan manakala orang yang berhutang belum bisa membayar hutangnya atau sengaja menunda-nunda pembayaran hutangnya. Berikut bunyt hadistnya:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ (رواه البخارى)

---

<sup>59</sup>Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), h. 157.



*Dari Aisyah ra., ia menceritakan bahwa Rasulullah Saw biasa berdoa dalam shalay, dan bacaanya: “Hai Tuhan! Sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari berbuat salah dan berhutang.” Ada orang yang bertanya kepada beliau: kenapakah engkau amat banyak minta perlindungan daripada verhutang? Beliau menjawab: “orang yang berhutang bila berkata berdusta, bila berjanji tidak menepatinya.”(Riwayat Imam Bukhari)<sup>60</sup>*

- c. Hutang piutang dapat merusak tali silaturahmi antar orang yang berhutang, jika salah satu diantara orang yang berhutang terutama orang yang diberi hutang telah mengingkari perjanjian dalam hutang piutang tersebut. Maka terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berhutang mengenai pengembalian hutang dan orang yang berhutang tidak mampu memenuhi permintaan orang yang memberi hutang maka penguasa atau hakim harus mencoba menengahi keduanya.
- d. Membebani mental orang yang diberi hutang, karena pada dasarnya hutang piutang adalah hal yang menjadi tanggungan yang memiliki kewajiban harus dibayar secara lunas.
- e. Perasaan tertekan karena kebebasan menggunakan pendapatan berkurang.<sup>61</sup> Manakala waktu pembayaran hutang sudah sampai dan harus dibayar otomatis akan mengurangi pendapatan yang semestinya.

---

<sup>60</sup> Imam Bukhari, *Op.Cit.*, h. 22.

<sup>61</sup> Supramono dan Nancy Putlia, Persepsi dan Faktor Psikologis dalam Pengembalian Keputusan Hutang, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14 No. 1 (Januari 2010), h. 29. Diakses 06 Maret 2019 Pukul 20:16 WIB.

## H. Hukum Hutang yang Mendatangkan Keuntungan

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Para ulama telah sepakat wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta yang dihutangkan dengan semisal apabila ia meminjam harta jenis *mitsli* (harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya), dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya bila pinjamannya dalam bentuk harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya seperti hewan, kayu bakar dan property) seperti mengembalikan hewan sapi dengan ciri-ciri yang mirip dengan sapi yang dipinjam.<sup>62</sup>

Ketika waktu pengembalian hutang telah jatuh tempo maka pihak pemberi hutang memiliki hak untuk menuntut dikembalikannya harta semisal yang telah dipinjamkannya baik harta jenis *mitsli* (harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya) maupun *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya seperti hewan, kayu bakar dan property). Apabila terdapat tambahan pembayaran dari sejumlah pinjaman utang diperbolehkan, asal kelebihan itu merupakan

---

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 379

kemaian dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.

Rasulullah Saw. Bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا , فَقَدَمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَجَعَلَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَا عِيًّا, فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه المسلم) .

*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shodaqoh. Beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, "saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun" beliau menjawab, "berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. (Riwayat Imam Muslim)<sup>63</sup>*

Menurut hadist di atas tersebut bahwa Rasulullah Saw pernah berhutang seekor unta muda yang kemudian pada saat pembayaran hutang beliau tidak menemukan unta yang sejenisnya, kemudian beliau membayar unta itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari unta yang beliau pinjam.<sup>64</sup> Dan hal tersebut atas keinginan beliau memberikan unta yang lebih tua dan pilihan untuk membayar hutang tersebut. Rasulullah Saw bukan termasuk yang sering berhutang, namun beliau tetap menganjurkan untuk menghindari berhutang. Dan hutang piutang sebaiknya tidak menjanjikan atau mensyaratkan apapun yang akan mendatangkan keuntungan pada awal akad.

---

<sup>63</sup> Imam Muslim, *Op. Cit.*, h. 3002.

<sup>64</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2016), h.

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad utang tersebut, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Terdapat beberapa syarat bolehnya memberikan kelebihan dalam hutang, yaitu:

- a. Tidak dipersyaratkan di awal, Jika ada persyaratan di awal maka termasuk riba.
- b. Murni atas inisiatif dan keinginan orang yang berutang. Jika kelebihan ini karena permintaan pemberi hutang, termasuk riba. Meskipun tidak ada kesepakatan di awal karena setiap keuntungan yang diperoleh dari hutang adalah riba. Jika tambahan bukan prasyarat awal, karena merupakan kerelaan dari pihak peminjam tidaklah masalah. Inilah yang menjadi pendapat jumhur (kebanyakan ulama) kecuali mazhab Imam Malik.<sup>65</sup>
- c. Tidak menjadi tradisi di masyarakat, Jika memberi kelebihan saat pelunasan menjadi tradisi di masyarakat, statusnya sama dengan dipersyaratkan di awal akad *qardh* (hutang piutang). Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama:

المَعْرُوفُ غُرْفًا كَالْمَشْرُوفِ طِشْرًا.<sup>66</sup>

*“Yang sudah dimaklumi di masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang disyaratkan”.*

---

<sup>65</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Op.Cit.*, h. 147

<sup>66</sup> Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Dhah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah* (Bairut: Mu’assasah Ar- Risalah, 1983), h. 179. Lihat, Nasrullah, *Maqashid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam, Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2010), h. 104. Diakses 10 Maret 2019 Pukul 06:29.

Menurut kaidah di atas yang telah disepakati oleh sekolah hukum untuk dapat digunakan dalam berbagai macam ranah masalah yang berkaitan dengan hukum, selama tidak ada nas yang menyinggungnya.

Kelebihan dalam pembayaran hutang yang tidak ada dalam persyaratan pada saat akad hutang terjadi juga ditanggapi oleh beberapa pendapat para ulama, seperti dalam kasus yang terjadi yaitu hutang hewan ternak. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kebolehan meminta pembayaran pinjaman yang melebihi nominal pinjaman.<sup>67</sup>

#### 1) Pendapat pertama

Orang yang berhutang hanya berkewajiban mengembalikan utang sesuai dengan nominal yang dipinjam. Pendapat ini merupakan keputusan hasil muktamar Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih oki) ke V, keputusan No. 42(4/5) 1988, yang berbunyi “dalam pembayaran utang pada mata uang tertentu mesti dengan nominalnya dan bukan dengan nilai tukarnya, karena utang dibayar dengan sejenisnya”.

Hal ini merupakan rekomendasi forum ilmiah seputar “mengikat hutang dengan fluktuasi harga” yang diselenggarakan oleh research and training institute di bawah Islamic development bank pada tahun 1987, yang berbunyi: “naik turunnya nilai tukar

---

<sup>67</sup> Erwandi Tarmisi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018), h. 522.

uang kartal tidak berpengaruh terhadap nominal pembayaran hutang, baik tingkat fluktuasi tersebut rendah maupun tinggi, kecuali turunnya sampai pada tingkat di mana uang kartal dianggap *munqathi'* (tidak laku)".

Dalil pendapat ini bahwa mewajibkan pembayaran hutang melebihi nominal utang yang dipinjam termasuk *riba dayn*.

## 2) Pendapat kedua

Orang yang berhutang berkewajiban mengembalikan hutang sejumlah daya beli hutang pada saat pembayaran yaitu sama antar daya beli pada saat pinjaman dengan daya beli saat pembayaran, sekalipun nominalnya berbeda. Pendapat ini didukung oleh Syaikh Ahmad Zarqa, Dr. Al Qrah Daghi, Dr. Al Farfur dan Dr. Al Qarsyi. Dalil pendapat ini bahwa dalam kaidah fikih disebutkan: <sup>68</sup>

الضَّرَرُ يُزَالُ.<sup>69</sup>

“Hal-hal yang merugikan harus dihapuskan”

Hal ini berarti, jika orang yang memberi hutang hanya membayar utang dengan nominal yang sama pada waktu pinjaman maka tindakan ini telah merugikan pihak orang yang

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 523.

<sup>69</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuti As-Syafi'I, *Al-Asybah Wa An-Nadza'ir Fi Al-Furu'* (Surabaya Indonesia: Muhammad bin Ahmad bin Nakham Wa Auladah, t.t), h. 59.

memberi hutang, karena nominal utang pada saat dikembalikan hanya setengah nilai utang pada saat pemberian pinjaman.

Kaidah fikih di atas tidak mutlak, tetapi dipersyaratkan agar kerugian yang dihapuskan tidak menyebabkan kerugian yang sama pada pihak kedua.

### 3) Pendapat ketiga

Pendapat ini merupakan keputusan Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami (divisi fikih rabithah alam Islam) bahwa penurunan daya beli uang bukan karena kelalaian *muqridh*. Menurut pendapat ketiga ini lebih kuat karena berpijak atas dasar keadilan yang merupakan salah satu *maqashidussyariah*. *Maqasid Al-syari'ah* sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai upaya keluar dari kebuntuan suatu permasalahan yang timbul namun secara *qath'iy* tidak terdapat petunjuk yang jelas dari nas baik Al-qur'an maupun hadist.<sup>70</sup>

Semua ini berlaku apabila masih ada ikatan hutang piutang antara pemberi dan peminjam. Adapun saat pelunasan hutang, apabila peminjam melebihi bayarannya sedang hutang disebabkan oleh jual beli maka hukumnya mutlak boleh dibayarkan baik dari segi sifat maupun ukuran dan baik dibayarkan pada batas waktu tertentu. Dan apabila hutang disebabkan oleh akad *qardh* (hutang piutang), maka jika

---

<sup>70</sup>Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, dalam *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII. No. 1 Juni 2014, h. 63. Diakses 03 Maret 2019 Pukul 18:48.

tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku, maka dibolehkan menurut kesepakatan Malikiyah. Hal ini pada benda yang sifatnya lebih baik, karena Nabi saw. Meminjam unta muda dan dikembalikan dengan unta yang lebih tua. Sedangkan ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* (hutang piutang) yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya. *Qardh* (hutang piutang) yang tidak dibolehkan apabila mengambil keuntungan dengan dipersyaratkan, jika seseorang mengutangkan kepada orang tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang atau nominal yang lebih baik maka hal itu diperbolehkan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Wahbah Zuhaili *Az-Zuhaily, Op.Cit.*, h. 380.



### **BAB III**

## **HUTANG PIUTANG DI DESA NEGARA RATU KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

### **A. Kondisi Geografis**

#### **1. Desa Negara Ratu**

Desa Negara Ratu memiliki luas administratif lahan yaitu 6.000

Ha. Wilayah administratif Desa Negara Ratu berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Way Tulung Buluh

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Batu Raja

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Padang Ratu

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ibul Jaya

Desa Negara Ratu dengan luas wilayah 6.000 Ha. Ini menurut luas wilayah penggunaan terbagi atas luas pemukiman yang digunakan oleh penduduk seluas 264,5 Ha. Untuk persawahan seluas 47 Ha. Perkebunan yang ditanami jagung seluas 40 Ha. Ubi kayu seluas 845 Ha. Dan hasil kebun lainnya seluruhnya seluas 3565 Ha. Dan untuk perkuburan pemerintah dan warga menyiapkan lahan seluas 5,5 Ha. Bagi warga yang meninggal dunia, pekarangan seluas 41 Ha. Dan prasarana umum seluas 1.700 Ha. Sedangkan tanah fasilitas umum terdapat lapangan olahraga seluas 5 Ha. Perkantoran pemerintah seluas 7 Ha. Seluruh bangunan sekolah 14 Ha, pertokoan 1 Ha. Fasilitas pasar 1 Ha. Dan jalan raya seluas 54,5 Ha.

Desa Negara Ratu merupakan salah satu desa yang berada dinaungan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara berdasarkan perda No. 20 tahun 2000, dengan Negara Ratu sebagai ibu kota kecamatan berdasarkan perda No. 25/200 tanggal 30-12-2000 tentang penataan, pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil pendataan profil desa tahun 2018 jumlah penduduk Desa Negara Ratu adalah 7146 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1  
Jumlah Penduduk Desa Negara Ratu

No	Nama Desa	Luas (Ha)	KK	Laki- laki	Perempuan
1	Negara Ratu	6.000	1829	3669	3664

*Sumber: Profil Desa Negara Ratu tahun 2018<sup>72</sup>*

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Negara Ratu didominasi oleh laki-laki, dengan kapasitas kepala keluarga yang cukup besar maka para perempuan atau yang sudah berumah tangga hidupnya lebih terjamin menurut segi sandang, pangan, serta papan.

---

<sup>72</sup>Profil Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara tahun 2018.

## 2. Sumber Daya Alam

Tabel 2

### Wilayah Menurut Penggunaan

No	Jenis Wilayah	Luas wilayah
1	Tanah sawah	80,00 Ha
2	Tanah kering	1.571,20 Ha
3	Tanah basah	4,50 Ha
4	Tanah perkebunan	4.205, 49 Ha
5	Fasilitas umum	138, 81 Ha
6	Tanah hutan	-
Total luas		6.000,00 Ha

Sumber: *Profil Desa Negara Ratu Tahun 2018*<sup>73</sup>

Berdasarkan data di atas bahwa wilayah menurut penggunaannya di dominasi oleh tanah perkebunan yang biasanya banyak ditanami tanaman singkong, karet dan sebagainya. Sedangkan, untuk tanah sawah, kering, basah serta fasilitas umum lebih banyak dimiliki oleh masyarakat sekitar Desa Negara Ratu.

Tabel 3

### Luas tanaman pangan menurut komoditas

Nama Komoditas	Luas Wilayah	Hasil
Jagung	40 Ha/m	30 Ton/Ha
Kacang Tanah	2 Ha/m	1,3 Ton/Ha

---

<sup>73</sup> Profil Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018.

Padi Sawah	25 Ha/m	30 Ton/Ha
Ubi Kayu	845 Ha/m	3000 Ton/Ha

Sumber: Profil Desa Negara Ratu tahun 2018<sup>74</sup>

Berdasarkan data di atas hasil tanaman pangan menurut komoditas di dominasi oleh ubi kayu seperti singkong, karena mayoritas penduduk adalah petani serta buruh tanaman singkong baik itu mengelola milik lahan pribadi maupun kerja sama antar perorangan. Untuk padi, kacang tanah, serta jagung meskipun hasilnya tidak sebesar komoditas singkong namun tetap menjadi penyumbang dalam pendapatan masyarakat Desa Negara Ratu.

Tabel 4

Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas

Nama Komoditas	Luas Wilayah	Hasil
Kelapa sawit	548 Ha/m	1,2 Kw/Ha
Kopi	10,5 Ha/m	1,2 Kw/Ha
Coklat	5 Ha/m	1,4 Kw/Ha
Karet	384 Ha/m	5,4 Kw/Ha
Tebu	12,5 Ha/m	70 Kw/Ha

Sumber: Data monografi Desa Negara Ratu tahun 2018<sup>75</sup>

Berdasarkan data menurut hasil perkebunan menurut komoditas Desa Negara Ratu di dominasi oleh tanaman tebu yang dinilai lebih ekonomis untuk dikembangkan dan juga dapat

<sup>74</sup>Profil Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018.

<sup>75</sup>Data Monografi Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018.

menghasilkan pendapatan yang sepadan. Untuk komoditas lainnya tetap menjadi pilihan masyarakat guna memanfaatkan lahan sesuai kegunaannya atau sesuai kondisi Desa Negara Ratu.

Tabel 5

Jumlah peternakan menurut jenisnya

Nama Hewan	Jumlah Pemilik	Jumlah Populasi
Sapi	133 jiwa	226 ekor
Kerbau	2 jiwa	4 ekor
Ayam Kampung	600 jiwa	1408 ekor
Ayam Boyler	3 jiwa	1200 ekor
Kambing	41 jiwa	190 ekor
Bebek	82 jiwa	185 ekor

*Sumber: Data monografi Desa Negara Ratu tahun 2018<sup>76</sup>*

Berdasarkan data di atas bahwa mayoritas masyarakat Desa Negara Ratu memilih untuk banyak memelihara hewan jenis ayam kampung yang dinilai lebih mudah dalam perkembangan biakannya serta memiliki nilai jual yang cukup tinggi dipasaran dan lebih sehat dari jenis ayam boyler, untuk ternak jenis sapi, kerbau, kambing serta bebek memiliki jumlah yang tidak banyak dipelihara oleh warga karena dinilai cukup sulit untuk dipelihara, walaupun ada itupun tidak sebanyak ternak ayam kampung.

---

<sup>76</sup>Data Monografi Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018.

Tabel 6  
Jumlah perikanan menurut jenisnya

Jenis ikan	Jumlah produksi
Mas	4,00 ton/th
Lele	3,00 ton/th
Nila	6,00 ton/th
Gurame	4,00 ton/th

*Sumber: Data monografi Desa Negara Ratu tahun 2018<sup>77</sup>*

Berdasarkan data di atas jumlah perikanan menurut jenisnya didominasi oleh jenis ikan nila atau ikan air tawar yang lebih mudah dikembangkan biakkan dan lebih banyak peminatnya dari pada jenis ikan mas lele serta gurame yang nilai jualnya sangat tinggi dipasaran. Dengan ini kebutuhan gizi masyarakat Desa Negara Ratu dipandang cukup baik.

### 3. Sumber Daya Manusia

#### a. Mata Pencarian Penduduk

Jumlah penduduk Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara adalah 7333 jiwa yang terdiri dari 3669 jiwa laki-laki dan 3664 jiwa perempuan dengan 1829 kepala keluarga yang menyebar di 10 dusun/likungan. Dengan data tersebut maka desa ini termasuk dalam kategori desa dengan jumlah penduduk yang cukup banyak.

---

<sup>77</sup>Data monografi Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018.

Penduduk desa ini memiliki jenis pekerjaan berbeda-beda, namun dengan jenis pekerjaan yang beragam banyak pekerjaan yang dilakukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dapat terlihat melalui pekerjaan sebagai petani. Pekerjaan ini dapat dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, berikut sajian jumlah penduduk menurut pekerjaanya:

Tabel 7  
Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	2478	2541
2	Buruh Tani	863	882
3	Pegawai Negeri Sipil	112	94
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	16	14
5	TNI	7	-
6	Montir	29	-
7	Pedagang keliling	38	24
8	Pembantu rumah tangga	-	23
9	Karyawan perusahaan swasta	62	61
10	Purnawirawan/pensiunan	19	13
Jumlah total penduduk		7.276	

*Sumber: Data monografi Desa Negara Ratu tahun 2018*<sup>78</sup>

Berdasarkan data hasil pekerjaan masyarakat di Desa Negara Ratu bahwa mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani baik itu petani sawah maupun petani perkebunan, dengan ini kita dapat melihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat cukup maksimal. Sedangkan pekerjaan yang lainnya seperti PNS, TNI dan sebagainya tetap ada dan menjadi kebanggaan suatu desa apabila dalam desa tersebut banyak yang terangkat sebagai PNS, TNI dan sebagainya.

b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan utama bagi perkembangan desa pada umumnya yang bersifat potensial, baik itu pendidikan formal maupun non formal.

Tabel 8

Tingkat pendidikan

Tingkatan pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	280	292
Usia 3-6 yang sedang masuk playgroup	106	93

---

<sup>78</sup>Data Monografi Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018.



Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	319	397
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	14	29
Usia 18-56 tahun pernah SD tidak tamat	122	121
Tamat SD	289	291
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	247	246
Usia 18-56 tahun tidak lulus SLTA	798	727
Tamat SMP	761	711
Tamat SMA	250	261
Tamat D-3	32	26
Tamat S-1	22	30
Tamat S-2	6	4
Jumlah total	6.474	

*Sumber: Data monografi Desa Negara Ratu tahun 2018<sup>79</sup>*

---

<sup>79</sup>Data Monografi Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018.

Berdasarkan data menurut pendidikan masyarakat Desa Negara Ratu mayoritas masyarakat sudah mulai mengerti arti pentingnya pendidikan sampai tingkat SLTA/SMA sederajat, hal ini dapat kita lihat melalui data di atas yang sudah didominasi oleh masyarakat lulusan tingkat SLTA/sederajat. Dapat diartikan bahwa masyarakat Desa Negara Ratu sudah termasuk dalam kategori Desa yang sejahtera dan makmur dimana masyarakatnya hidup aman, damai serta berkecukupan dalam segala hal termasuk pendidikan. Kemudian jumlah tenaga kerja yang terdapat di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

Tabel 9

Jumlah tenaga kerja

Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun	1102	1120
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	1006	1011
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja	96	109

Penduduk usia 0-6 tahun	521	511
Penduduk usia 56 tahun ke atas	110	121
Angkatan kerja	789	780
Jumlah	3.624	3.652
Total jumlah	7.276	

Sumber: Data monografi Desa Negara Ratu tahun 2018<sup>80</sup>

Berdasarkan data di atas bahwa usia pekerja di Desa Negara Ratu masih didominasi oleh usia remaja sampai orang tua (18 tahun-56 tahun), mereka biasanya memilih bekerja di usia 18 tahun atau sudah terhitung lulus tingkat SLTA/ sederajat. Dengan ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bekerja atau menciptakan pekerjaan sudah mulai diterapkan di Desa Negara ratu.

#### 4. Agama dan Suku

Tabel 10  
Jumlah agama

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	3597	3592
Kristen	42	37
Katolik	13	16

---

<sup>80</sup>Data Monografi Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018.

Hindu	17	19
Jumlah	3.669	3.664

*Sumber: Profil desa dan kelurahan Negara Ratu tahun 2018<sup>81</sup>*

Berdasarkan data tersebut di atas mayoritas agama/kepercayaan penduduk Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yaitu Islam, selebihnya terbagi dalam beberapa agama seperti Kristen, dan katolik. Berikut jumlah sarana dan prasarana dalam peribadatan:

Tabel 11  
Tempat peribadatan

Tempat peribadatan	Jumlah
Masjid	36
Musholla/langgar	8
Gereja Kristen protestan	2
Gereja katolik	1

*Sumber: Profil desa dan kelurahan Negara Ratu tahun 2018<sup>82</sup>*

Berdasarkan data tempat peribadatan di Desa Negara Ratu masih didominasi oleh tempat peribadatan umat muslim yaitu masjid, setidaknya setiap dusun memiliki satu masjid sebagai pusat peribadatan. Adapun tempat peribadatan lain seperti gereja tetap ada dan tetap saling menjaga toleransi antar umat beragama.

Tabel 12

---

<sup>81</sup> Profil Desa dan Kelurahan Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018

<sup>82</sup> Profil Desa dan Kelurahan Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018

Suku/etnis

Suku	Laki-laki	Perempuan
Batak	17	20
Sunda	30	25
Jawa	3036	3039
Bali	4	5
Lampung	532	535
Ogan	50	40
Jumlah	3.669	3.664

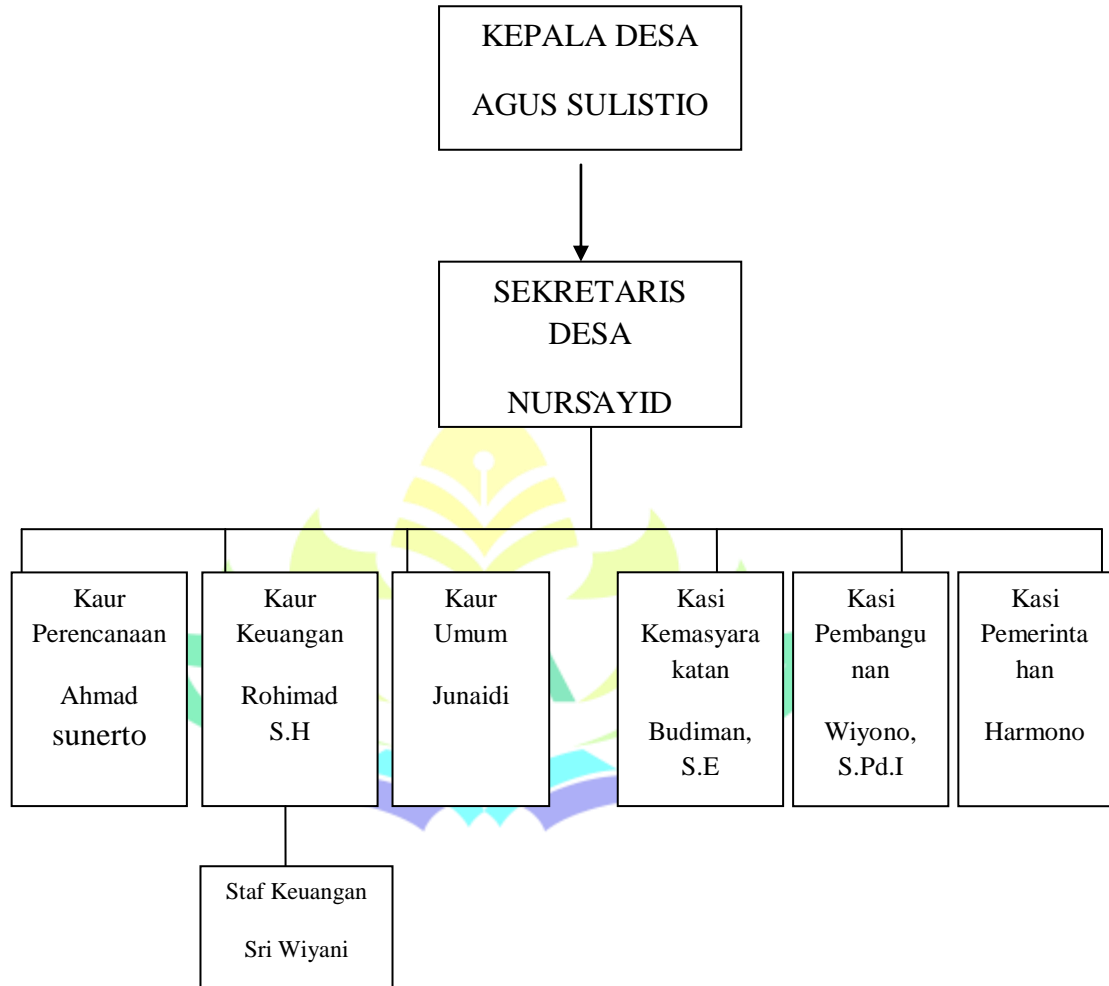
*Sumber: Profil Desa Negara Ratu tahun 2018<sup>83</sup>*

Dapat dilihat melalui tabel di atas bahwa mayoritas Desa Negara Ratu sukunya adalah suku jawa, namun tetap tidak menghilangkan kerukunan antar suku satu dengan suku lainnya. Dalam hal ini yang biasa disebut dengan pluralisme budaya dimana keadaan budaya yang majemuk dengan pengertian bahwa mereka hidup bersama secara toleransi.

---

<sup>83</sup> Profil Desa dan Kelurahan Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Tahun 2018

## 5. Struktur Perangkat Desa



### B. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kultur budaya adalah segala cakupan budaya yang sudah ada secara turun temurun yang meliputi bidang seni, pengetahuan, hukum, kepercayaan, adat istiadat, pola kebiasaan masyarakat dan hal terkait lainnya yang ada di suatu wilayah masyarakat tertentu. Budaya merupakan salah satu aspek kehidupan yang tidak pernah bisa lepas dari masyarakat seperti dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder, aspek

masyarakatlah yang menjadi pendukung terpenting dalam pemenuhannya. Kultur budaya masyarakat Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara didapatkan melalui pengamatan langsung ke masyarakat dan juga mengakses data ke kantor desa, dari hasil pengamatan tersebut kultur budaya desa masih sangat terasa.

Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan cara, saling mengenal satu sama lain, tolong-menolong, dan menjaga silaturahmi yang baik antar masyarakat desa. Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara memiliki sistem kekeluargaan dan kebersamaan sehingga tidak ada jenjang antara generasi muda dan generasi para orang tua. Namun, tetap tidak menghilangkan rasa hormat terhadap generasi yang lebih tua.

Penduduk Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagian besar berasal dari suku Jawa. Budaya desa pada umumnya juga masih berjalan lancar di desa ini seperti ronda malam, yasinan bergilir yang dilakukan setiap malam Jumat dengan kurun waktu seminggu sekali, dan pengajian rutin ibu-ibu setiap hari Selasa dengan kurun waktu seminggu sekali. Masyarakat desa sekitar 98% memeluk agama Islam sehingga sangat loyal terhadap sarana dan prasarana masjid. Tidak sedikit warga yang mau menyumbangkan dana untuk memperbaiki bangunan-bangunan masjid yang sudah rapuh termakan usia.

Adapun kesenian yang terdapat di desa ini dan masih berjalan seperti rebana, drumband dan sebagainya. Kesenian rebana digunakan manakala perayaan hari-hari besar di masjid-masjid seperti perayaan maulid nabi. Kesenian drumband merupakan kesenian yang sudah masuk di sekolah-sekolah yang terdapat di desa. Meskipun mayoritas suku berasal dari suku jawa tetapi tidak menghilangkan adat istiadat dari suku lain seperti suku lampung, dalam suku ini masih sangat mempertahankan adat istiadat ini terbukti ketika diadakannya pesta pernikahan, sunatan dan akikahan mereka masih menggunakan adat istiadat lampung yang kental. Budaya yang terdapat di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara masih sangat beragam dan terus dipertahankan supaya kelak anak cucu dan generasi selanjutnya masih dapat melihat dan menikmati budaya-budaya tersebut.

### **C. Praktik Hutang Hewan Sapi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara**

Masyarakat Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sangat bergantung pada penghasilan melalui tani tersebut. Terkadang masyarakat lebih memilih jalan melakukan hutang piutang antar sesama masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan anggapan melakukan transaksi hutang sesama



masyarakat dirasa lebih mudah dan cepat dibanding harus berhutang melalui lembaga atau organisasi.

Pelaksanaan praktik hutang hewan sapi di Desa Negara Ratu yang dilakukan oleh sesama masyarakat, yang tidak melibatkan lembaga ataupun organisasi. Meskipun hanya transaksi hutang piutang sesama masyarakat tetap dalam transaksi ini memiliki kekuatan hukumnya. Karena dalam setiap hutang piutang terdapat hak dan kewajiban yang harus diselesaikan seperti hak orang yang memberi hutang yaitu mendapatkan kembali sejumlah objek atau barang yang dihutangkannya dan kewajiban orang yang berhutang yaitu melunasi atau mengembalikan objek atau barang yang sudah dihutang.

Ibu Saripah sebagai pihak yang menerima hutang atau pihak yang berhutang kepada bapak Karmin selaku pihak yang memberikan hutang, keduanya telah sepakat menggunakan akad hutang piutang. Akad hutang hewan sapi yang berlangsung pada tahun 2000 dengan objek hutang yaitu seekor sapi yang termasuk dalam kategori hewan ternak. Harga seekor sapi pada tahun 2000 atau pada awal akad hutang hewan sekitar Rp.5.000.000, dan pada saat akan dikembalikan tahun 2017 telah mengalami kenaikan nilai/harga sebesar Rp. 10.000.0000 karena telah melewati 17 tahun sejak akad hutang hewan sapi terjadi.

Kejadian seperti tersebut di atas dapat menjadi salah satu kendala dalam pelunasan hutang hewan sapi, karena terdapat perbedaan harga yang lebih tinggi daripada harga awal. Terkecuali jika pihak orang yang

berhutang ikhlas melunasi hutang tersebut dengan harga yang berlaku saat ini.

Hutang yang terjadi sesama masyarakat pada umumnya merupakan bentuk tolong-menolong dengan orang yang memberi hutang menolong dengan cara meminjamkan sejumlah objek hutang kepada orang yang menerima hutang, namun dalam praktiknya hutang berjalan lancar sampai pada titik pelunasan hutang barulah timbul permasalahan.

Masyarakat Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara masih kurang memperhatikan dalam proses hutang piutang yaitu pada saat perjanjian awal hutang tersebut terjadi, dalam hutang piutang benar tidak menggunakan lembaga atau organisasi namun masyarakat terkadang hanya melakukan perjanjian melalui mulut ke mulut atau secara lisan. Jelas perjanjian hutang semacam ini sulit untuk digunakan sebagai bukti otentik bahwa orang yang menerima hutang telah berhutang sejumlah objek tertentu dengan kurun waktu tertentu. Yang terjadi di masyarakat Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara mereka hanya melakukan sighat/ijab kabul secara lisan semisal seperti ini ibu Saripah selaku pihak yang berhutang dan bapak karmin selaku pihak yang memberi hutang mengatakan bahwasanya saya hutangkan seekor sapi ini kepada ibu saripah dan ibu saripah langsung menerima objek hutang tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lokasi tersebut, maka dapat dipaparkan hasil wawancara yang dilakukan langsung

kepada pihak yang terkait dalam hutang piutang tersebut yang dikumpulkan dalam sejumlah data hasil wawancara, data observasi dengan pihak-pihak dalam hutang piutang. Berikut sejumlah data hasil wawancara dan observasinya:

Bapak Karmin adalah orang yang memberi hutang (*muqridh*) atau memberikan objek hutang berupa sapi, kepada ibu Saripah. Akad hutang hewan sapi ini terjadi pada tahun 2000 yang pada saat itu nilai/harga seekor sapi sebesar Rp. 5.000.000, kemudian ibu Saripah mendatangi bapak Karmin untuk meminta agar sapi dipinjamkan atau dihutangkan. Dengan perjanjian akan dikembalikan setelah rumah yang ibu saripah bangun berdiri.<sup>84</sup> Bapak Karmin tidak termasuk dalam orang yang sering meminjamkan objek hutang berupa hewan sapi tersebut, namun karena ibu Saripah membutuhkan dana yang besar maka berhutanglah seekor sapi kepada bapak Karmin. Yang nantinya sapi tersebut dipinjam dan digunakan untuk membangun rumah.

Ibu Saripah adalah orang yang menerima hutang (*muqtaridh*) dari bapak Karmin, menurut penuturan beliau benar yang dikatakan bapak karmin bahwa ibu Saripah berhutang seekor sapi kepada bapak Karmin dan sapi tersebut digunakan untuk membangun rumah ibu Saripah. Setelah rumah terbangun dan sapi tersebut sudah habis dipakai dengan kurun waktu 2 tahun kemudian, namun ibu Saripah belum mampu mengembalikan sapi tersebut dengan alasan ingin membelikan mobil jenis

---

<sup>84</sup> Karmin, Wawancara dengan Penulis, Negara Ratu, 9 Desember 2018

pick up untuk anak laki-laki ibu Saripah.<sup>85</sup> Maka tertundalah pembayaran hutang hewan sapi tersebut selama 17 tahun dan setelah 17 tahun kemudian ibu saripah sudah mampu mengembalikan namun nilai/harga dari objek hutang tersebut yaitu seekor sapi sudah berubah yang semula pada akad tahun 2000 senilai Rp. 5.000.000 kini setelah 17 tahun kemudian menjadi Rp. 10.000.000.

Ibu Rosidah adalah anak perempuan dari ibu Saripah, yang juga mengetahui perihal hutang piutang tersebut. Selain digunakan untuk membangun rumah, sapi tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama beberapa minggu.<sup>86</sup>

Bapak Suwarsito selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Negara Ratu mengatakan bahwa hutang piutang memang tidak dilarang dalam Islam bahkan agama Islam pun membolehkan umatnya berhutang selama dalam keadaan tertentu dan terpaksa dan bukan hanya sekedar untuk bermewah-mewah. Dalam Islam pun tata cara dan aturan hutang piutang sudah diatur sehingga, untuk pelaksanaannya tidak bisa dilakukan semena-mena. Menurut penuturan beliau perihal pengembalian hutang hewan ternak dengan nilai yang berbeda jika dilihat melalui pandangan sosial bermasyarakat kurang adil karena terdapat pihak yang merasa diberatkan, hutang yang seharusnya awalnya menjadi penolong justru sebaliknya. Dalam kasus hutang hewan sapi antara ibu saripah dan bapak karmin, menurut penuturan bapak suwarsito apabila terjadi konflik antar

---

<sup>85</sup> Saripah, Wawancara dengan Penulis, Negara Ratu, 10 Desember 2018

<sup>86</sup> Rosidah, Wawancara dengan Penulis, Negara Ratu, 14 Desember 2018

masyarakat karena hutang hendaknya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan sehingga tidak sampai memutuskan tali saliturahmi hanya karena hutang piutang.<sup>87</sup>

masyarakat lebih memilih berhutang sesama masyarakat atau berhutang dengan keluarga atau saudara karena dirasa lebih cepat. Terlebih jika hanya berhutang uang yang nominalnya tidak besar jika harus meminjam atau berhutang melalui lembaga seperti bank akan lebih mempersulit, maka dari itu masyarakat khususnya Desa Negara Ratu apabila berhutang lebih memilih berhutang sesama masyarakat.

Bapak Tumadi, S.Ag, M.Pd.I sebagai tokoh agama di Desa Negara Ratu mengatakan bahwa hutang yang dikembalikan dengan nominal atau nilai yang berbeda memang tidak terdapat larangan khusus dalam Islam yang seharusnya disamakan dengan nominal atau nilai pada saat berhutang untuk meminimalisir konflik antar keduanya. Melainkan kita di sini melihat rujukan pendapat-pendapat para ulama yang lebih condong atau lebih kuat terhadap yang mana, seperti membolehkan membayar hutang dengan menyesuaikan harga dan atau melarang pembayaran hutang dengan melihat harga objek hutang yang sedang berlaku atau dengan jalan lain seperti melihat pada perjanjian atau kesepakatan awal dalam hutang piutang tersebut. Hutang piutang dibolehkan asal sudah mencukupi rukun dan syarat, dalam kasus ibu Saripah dan bapak Karmin rukun dan syarat hutang sudah terpenuhi dan mereka sudah saling ridha melaksanakan

---

<sup>87</sup> Suwarsito, Wawancara dengan Penulis, Negara Ratu, 22 Desember 2018

kesepakatan hutang hewan ternak tersebut. Selanjutnya dalam hutang yang penting yaitu perjanjian tertulis sehingga dapat dijadikan bukti nantinya pada saat proses pembayaran, jika kita melihat masyarakat umumnya tidak seluruhnya menggunakan perjanjian tulis melainkan hanya menggunakan lisan saja dan itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita dan sah-sah saja selama keduanya saling amanah.<sup>88</sup> Menurut penuturan beliau pengembalian hutang yang terdapat kelebihan pembayaran pada akhirnya dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam riba karena terdapat kelebihan dalam pembayaran sekalipun tidak diperjanjikan pada awalnya, maka dari itu hendaknya hutang yang seperti ini dibayarnya dengan melihat nominal hutang bukan nominal harga pada barang hutang tersebut.

Imam Ma'ruf Khaidar A.Md. sebagai pimpinan pondok pesantren Al-Mubarak, menurut penuturan beliau hutang merupakan salah satu cabang dalam bermuamalah yang terlihat mudah namun ternyata cukup sulit untuk diselesaikan karena masalah dalam hutang piutang sangatlah banyak dan beragam meskipun masyarakat luas pun mengetahuinya bahwasanya yang namanya hutang harus lunas terbayar namun, bagaimana jika terdapat kelebihan dalam pembayaran hutang tersebut maka itu dapat dikatakan sebagai riba dalam hutang piutang dengan syarat sudah diperjanjikan ketika awal proses hutang piutang. Kalaupun tidak

---

<sup>88</sup> Tumadi, Wawancara dengan Penulis, Negara Ratu, 23 Desember 2018

diperjanjikan sejak awal dikhawatirkan tetap terjerumus ke dalam riba, sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak terlibat dalam hal tersebut.<sup>89</sup>

Perihal pengembalian hutang hewan ternak dengan nilai yang berbeda, berbeda pada nominal harga pada saat hutang dan nominal harga pada saat pembayaran hutang. Pembayarannya cukup dengan merujuk pada nominal hutangnya saja, contoh ibu Saripah berhutang sapi seharga 5.000.000 pada tahun 2000 kemudian akan dibayar pada tahun-tahun berikutnya yang perlu dilihat dalam pembayaran hutangnya hanya nominal hutangnya saja yaitu 5.000.000.

Transaksi hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam seperti terpenuhinya rukun dan syarat hutang, tidak memperjanjikan kelebihan pembayaran, objek hutang jelas dan halal. Mayoritas masyarakat sudah melakukan hutang piutang sesuai dengan syariat Islam, meskipun masih terdapat yang tidak sesuai syariat Islam seperti masih memperjanjikan tambahan di awal pembayaran. Menurut pandangan saya hutang piutang merupakan permasalahan yang sulit dan cukup rancu, terutama dalam hal pengembalian hutangnya. Contoh saja seperti masalah ibu Saripah, cukup membingungkan untuk hal pengembaliannya dikhawatirkan jika melebihi nominal hutang maka akan terjerumus dalam riba meskipun tidak perjanjikan diawal akad. Meskipun sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa patokan membayar hutangnya hanya dengan melihat nominal hutangnya saja bukan pada harga yang berlaku. Melalui masalah-masalah hutang

---

<sup>89</sup> Imam Ma'ruf Khaidar, Wawancara dengan Penulis, Negara Ratu, 27 Desember 2018

seperti ini kita dapat belajar bahwa perihal hutang piutang bukanlah hal mudah dan ringan, karena sekecil apapun hutang tetap ada pertanggung jawabannya terlebih lagi jika hutang tidak sampai terbayar maka sampai meninggal dunia sekalipun hutang tersebut tetap akan menjadi tanggung jawab orang yang berhutang atau para ahli warisnya.

Praktik hutang hewan ternak di Desa Negara Ratu dalam obyek hutang yaitu seekor sapi sudah sah dilaksanakan karena telah memenuhi syarat serta rukun secara fikih muamalah, meskipun hutang hewan ternak ini masih jarang terjadi karena mayoritas masyarakat masih memilih berhutang berupa uang atau benda lainnya.

Karena hukum hutang itu sendiri bersifat mengikat kedua belah pihak maka hutang tidak bisa diputuskan begitu saja oleh salah satu pihak, melainkan harus diselesaikan secara kesepakatan terutama dalam hal pengembalian hutangnya.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### **A. Praktik Hutang Hewan Sapi dan Pengembaliannya dengan Nilai yang Berbeda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara**

Hutang merupakan transaksi yang melibatkan harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkan agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya. Tentunya dalam setiap transaksi khususnya hutang harus memenuhi rukun dan syaratnya seperti adanya *muqtaridh* (orang yang berhutang), *muqridh* (orang yang memberi hutang), objek hutang dan sighthat/ijab Kabul.

Menurut pengamatan peneliti dalam transaksi hutang hewan ternak yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Negara Ratu telah memenuhi rukun dan syarat akad *qardh* yaitu sama-sama baligh, dan berakal. Hutang hewan ternak dalam jenis hewan sapi yang terjadi merupakan hutang yang bersifat konsumtif artinya hutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan obyek hutang termasuk dalam harta yang dibolehkan yaitu jenis harta *qimiyyat*. Jika *muqtaridh* (orang yang menerima pinjaman hutang) membutuhkan hutang tersebut, dan *muqridh* (orang yang memberi pinjaman hutang) memberikan pertolongannya dalam bentuk pinjaman hutang seperti hutang hewan ternak. Maka perilaku

ini merupakan refleksi dari firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2, berikut berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَتَّقُوا النَّاسَ وَلَوْ اَنَّهُمْ يَأْخُذُوْكُمْ بِاَنۡفُسِكُمْ ۚ وَاعۡلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يۡعۡزِزُ الَّذِيۡ يَتَّقِ وَيُخۡسِئُ الَّذِيۡ يَسۡفُكُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰمَ السَّامِعِيْنَ

الْعَقَابِ شَد

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>90</sup>

Hutang yang terjadi semata-mata hanya untuk menolong pihak *muqtaridh* (orang yang menerima hutang) untuk dapat menjalankan kembali kebutuhannya, menolong melalui memberi pinjaman hutang diperbolehkan (dibenarkan) karena pihak *muqridh* (orang yang memberi pinjaman) semata-mata hanya menolong orang yang membutuhkan.

Berikut terjadinya praktik hutang hewan ternak. Pada tahun 2000 ibu Saripah mendatangi kediaman bapak Karmin bertempat di dusun I Rt/Rw 002/001 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, kemudian ibu Saripah langsung mengutarakan keinginannya bahwa beliau akan meminjam atau berhutang seekor sapi yang memang ditenakkan atau dipelihara oleh bapak Karmin. Pada saat itu tepatnya pada tahun 2000 nilai/harga sapi yang menjadi obyek hutang yaitu Rp. 5.000.000., dan perjanjian yang dilakukan oleh ibu saripah dan bapak karmin hanya melalui lisan dan tidak ada bukti tertulis, karena

---

<sup>90</sup>Q.S. Al-Maidah (5): 2.

menurut penuturan bapak Karmin beliau mempercayai ibu Saripah. Setelah objek hewan ternak yaitu seekor sapi diberikan dan sighat/ijab kabul dari kedua belah pihak telah terucap dan syarat-syarat dalam hutang piutang telah dipenuhi maka sah lah transaksi hutang hewan sapi tersebut.

Menurut pemaparan tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren di Desa Negara Ratu hutang piutang sudah sangat lumrah terjadi karena hutang menjadi pilihan terakhir seseorang dalam memenuhi kebutuhannya yang terdesak. Sedangkan untuk hutang hewan ternak masih jarang terjadi, walaupun ada tidak sebanyak hutang piutang pada umumnya seperti hutang uang atau hutang barang dan sebagainya. Meskipun begitu tetap saja hutang hewan ternak memiliki kekuatan hukum yang mengikat antar kedua pihak yaitu harus terpenuhinya masing-masing hak dan kewajiban antara pihak *muqtaridh* dan *muqridh* atau pihak penerima hutang dan pihak pemberi hutang seperti harus terbayarnya hutang dan setelah penyerahan obyek hutang pihak pemberi hutang tidak bisa mengambil kembali barang yang sudah menjadi obyek hutang tersebut, karena pada hukumnya hutang piutang adalah mengikat kedua belah pihak yang tidak bisa hanya diputuskan oleh salah satu pihak. Dalam hutang hewan sapi yang terjadi ini termasuk dalam kategori harta *qimiyyat* yaitu harta yang dihitung berdasarkan nilainya, seperti hewan, kayu, dan properti.

Pengembalian hutang hendaknya merujuk kepada perjanjian atau akad awal hutang tersebut. Jika dalam perjanjian tersebut tidak terdapat bukti otentik seperti bukti tertulis maka kedua belah pihak yang berhutang

harus melakukan musyawarah yang biasa dilakukan masyarakat desa dalam menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Merujuk pada kebiasaan masyarakat desa dalam hal ini adat istiadat dapat dijadikan pedoman atau pegangan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat istiadat dapat menjadi sebuah hukum yang diberlakukan dalam suatu kaum atau masyarakat. Karena hukum yang ditetapkan berdasarkan adat istiadat yang baik (*urf shahih*) adalah benar. Menurut kedua pendapat tokoh dan dalil tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai berbeda yang terjadi di Desa Negara Ratu telah sah dan disepekat oleh kedua pihak yang terlibat dalam hutang piutang.

Menurut tokoh agama transaksi hutang hewan ternak dibolehkan karena transaksi ini berlandaskan rasa tolong-menolong, namun untuk pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda tidak merujuk kepada kemakmuran masyarakat khususnya pihak penerima hutang. Jika pengembalian hutang hewan sapi disesuaikan dengan harga yang berlaku maka akan ada penambahan nominal dalam pengembalian hutang hewan ternak tersebut, sehingga pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda bertentangan dengan hukum Islam karena hutang piutang hendaknya menimbulkan kemaslahatan bagi pihak yang diberi pinjaman hutang di Desa Negara Ratu.

Merujuk kepada salah satu pendapat yang sudah disebutkan dalam bab kedua yaitu dalam pendapat ketiga yang merupakan keputusan Al

Majma' Al- Fiqhiy Al- Islami (divisi fikih rabithah alam Islam) bahwapenurunan daya beli uang bukan karena kelalaian *muqridh*, maka dapat diartikan bahwa kenaikan atau perubahan nilai mata uang atau perubahan harga pada komoditi hewan bukan karena kelalaian orang yang berhutang, jadi jika pembayaran hutang merujuk pada perubahan nilai sah sah saja. Selama tidak dipersyaratkan pada awal akad *qardh* (utang piutang).

Pembayaran hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda di Desa Negara Ratu, apabila merujuk pada obyek yang lebih baik maka dibolehkan selama tidak diperjanjikan, disyaratkan atau menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Karena Nabi Saw pernah meminjam unta muda dan dikembalikan dengan unta yang lebih tua dan pilihan.

Adapun keterangan larangan *qardh* yang menarik keuntungan menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i dan yang paling kuat adalah makruh. Menarik keuntungan dalam arti ada syarat keuntungan sesuai kebiasaan yang berlaku. Otomatis kebiasaan yang berlaku ini sudah diperjanjikan mulai dari awal akad *qardh*.

Desa Negara Ratu sendiri tidak menjadikan adanya syarat keuntungan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Petunjuk agama menghendaki agar setiap muslim saling tolong-menolong dalam mengerjakan kabajikan dan senantiasa berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang baik dan tidak selalu memilih jalan berhutang. Menurut berbagai pandangan di atas tersebut

maka bagi penulis pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara karena merujuk kepada perubahan nilai atau perubahan harga pada komoditi hewan diperbolehkan, selama hal tersebut bukan menjadi syarat mutlak karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat melainkan sebagai itikad baik dari penerima hutang kepada pemberi hutang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibn Aj-Jauziyah bahwa “perubahan fatwa hukum dan perbedaannya itu disebabkan karena perubahan situasi, kondisi, niat dan tradisi.”<sup>91</sup>

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Hutang Hewan Sapi Dengan Nilai Yang Berbeda**

Menurut Islam hutang disebut dengan istilah *qardh* yang berarti menyerahkan harta kepada orang yang ingin memanfaatkan dan nanti akan dikembalikan penggantinya. Akad dalam hutang merupakan akad *tabarru'* (tolong-menolong). Menolong orang lain dengan cara menghutangi adalah sunnah seperti dalam hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزَ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.  
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

---

<sup>91</sup>Ibn Qayyim Aj-Jauziyah, I'lam Al-Muwanggi'im 'An Rabb Al-Alamin, Cetakan Ke 1 (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004), h. 483.

*“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: ada seorang laki-laki yang suka menghutangi orang-orang, lalu dia berkata kepada pelayannya, ‘jika seorang yang kesusahan datang kepadamu maka berilah kemudahan kepadanya, semoga Allah memberi kemudahan kepada kita.’ Kemudian bertemu Allah (meninggal), maka Allah pun member kemudahan kepadanya. Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa ‘Ubaidillah bin Utbah’ telah menceritakan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata saya mendengar Rasulullah Saw bersabda seperti itu.(Riwayat Imam Muslim)<sup>92</sup>*

Transaksi muamalah khususnya dalam hutang piutang diperbolehkan selama tidak terdapat sesuatu yang melarangnya. Berdasarkan Al-Qur’an, hadist dan ijma’ para ulama pun demikian. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245:

يُقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ، فَيُضْعِفُهُ، حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنٍّ

تَرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>93</sup>*

Ayat lain yang menyebutkan tentang hutang adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

لَمْ يَأْتِكُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسَّرَ إِلَىٰ فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٌ ذُو كَانٍ وَإِنْ

تَع

<sup>92</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Kitab Shahih Muslim*, Juz IV Terjemahan Abd. Rasyid Shiddiq dkk (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), h. 2922.

<sup>93</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 245.

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>94</sup>*

Melalui beberapa landasan Al-Qur'an dan hadist di atas tersebut maka secara jelas bahwa transaksi hutang piutang boleh dilakukan terutama dalam keadaan terdesak atau sangat membutuhkan. Tetapi, ketika proses pengembalian hutang masih terdapat beberapa perbedaan. Seperti pengembalian hutang yang berbeda pada saat akad hutang dan pada saat akan dibayarkan. Perbedaan ini menghasilkan adanya tambahan nominal dalam transaksi pembayaran hutang yang diakibatkan oleh perubahan waktu. Pengembalian harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta *mitsli* karena harta yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan apabila yang dipinjam adalah harta *qimiyyat* yaitu harta yang dihitung berdasarkan nilainya maka ia mengembalikan dengan barang yang semisal secara bentuk karena Rasulullah Saw pernah berhutang unta muda dan dikembalikan dengan unta yang lebih tua dan pilihan.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat seputar kebolehan meminta pembayaran hutang melebihi nominal. Pendapat pertama yang dikemukakan dalam keputusan hasil muktamar Majma' Al-Fiqh Al-Islami menyebutkan dalam pembayaran utang pada mata uang tertentu mesti dengan nominalnya dan bukan dengan nilai tukarnya, karena utang dibayar

---

<sup>94</sup>Q.S Al-Baqarah (2): 280.



dengan sejenisnya. Jika pembayaran hutang melebihi nominal utang yang dipinjam maka termasuk dalam *riba dayn*.

Sedangkan pendapat lain menyebutkan pembayaran hutang harus melihat pada perubahan nominal yang berlaku dalam arti orang yang berhutang berkewajiban mengembalikan hutang sejumlah daya beli hutang pada saat pembayaran yaitu sama antar daya beli pada saat pinjaman dengan daya beli pada saat pembayaran sekalipun nominalnya berbeda, pendapat ini didukung oleh salah satunya Syaikh Ahmad Zarqa. Terdapat kaidah fikih yang digunakan untuk memperkuat pendapat ini, yaitu:<sup>95</sup>

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *Hal-hal yang merugikan harus dihapuskan.*

Menurut pendapat ini jika orang yang berhutang hanya membayar sejumlah nominal hutangnya saja sedangkan sudah terjadi perubahan nominal selama tahun-tahun yang lalu, maka akan ada kerugian yang dialami oleh pihak pemberi hutang.

Namun, terlepas dari beberapa pendapat di atas, penulis memiliki pandangan tersendiri tentang pengembalian hutang dengan nilai yang berbeda. Menurut penulis pengembalian hutang dengan nilai yang berbeda hukumnya adalah boleh dan tidak diharamkan. Hal ini mengacu kepada beberapa alasan, antara lain adalah:

**Pertama**, suatu hal yang rasional, apabila pemberi hutang meminta kelebihan pembayaran yang disebabkan naiknya daya beli pada saat ia

---

<sup>95</sup>Erwandi Tarmisi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Mulia Berkat Insani, 2002), h. 523.

memberikan hutang. Sebagai contoh, A memberikan pinjaman/hutang kepada B pada tahun 2016 sebesar Rp. 12.000.000., kemudian ia meminta tambahan dari penerima hutang sebesar Rp. 3.000.000., pada tahun 2019. Karena pada dasarnya, harga kebutuhan pada tahun 2016 tidaklah sama pada tahun 2019, seperti harga sapi pada tahun 2000 seharga Rp. 5.000.000., dan pada tahun 2017 harga tersebut naik seharga Rp.10.000.000., Hal ini sebagaimana yang telah diputuskan oleh al-Majma' Al-Fiqhy al-Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami).

**Kedua**, secara tidak langsung penerima hutang adalah penyebab turunya harga daya beli. Apabila ia membayar hutangnya dengan waktu yang relative singkat, maka tidak akan terjadi turunnya daya jual. Dan di samping itu pula sejumlah hutang yang ia pinjam akan lebih bermanfaat dan dapat dikembangkan kembali oleh pemberi hutang, sebagai contoh untuk permodalan suatu usaha.

**Ketiga**, pengembalian hutang dengan nilai yang berbeda ini tidak diperjanjikan di awal akad. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّاً فَوْقَهَا فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خَيْرَكُمْ قَضَاءٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

*“Dari Abu Hurairah R.A: dahulu Nabi shalallahu’alaihi wassalam punya tanggungan utang seekor unta dengan umur tertentu untuk seseorang, maka orang itupun datang dan minta dilunasi. Rasulullah shalallahu’alaihi wassalam bersabda: ‘Berikan kepada dia.’ Maka para sahabat mencari yang seumur, namun mereka tidak mendapati kecuali yang lebih tua. Maka beliau mengatakan: ‘Berikan itu kepadanya.’ Orang itupun mengatakan:*

*'Engkau telah penuhi aku, semoga Allah memenuhimu.'* Maka Nabi *shalallahu'alahi wassalam* bersabda: *"Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi."* (Hadist Riwayat Bukhari).<sup>96</sup>

Berdasarkan hadis di atas juga menunjukkan bahwa diperbolehkan menunaikan utang lalu mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mengganti di sini bisa jadi dari sisi sifatnya, bisa jadi pula dari sisi jumlah. Apabila yang disebutkan dalam hadis adalah dari sisi sifat, artinya unta yang diganti adalah dengan unta yang lebih baik. Bisa juga diganti dengan jumlah yang lebih banyak. Misalnya, ada yang meminjam 1 kg beras, kemudian diganti 2 kg. Itu sah-sah saja. Karena yang bisa kita pahami adalah makna umum, yaitu bisa mengganti utang dengan sesuatu yang lebih baik, di situ bisa dipandang dari sisi jumlah ataupun sifat. Kita bukanlah berpatokan pada kisah atau sebab yang disebutkan dalam hadis. Namun makna umumnya yang diambil. Kaidah yang biasa disebutkan oleh para ulama:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.<sup>97</sup>

*"Yang jadikan ibrah (patokan hukum) adalah keumuman lafazhnya, bukan khususnya suatu sebab."*

**Keempat**, menitik beratkan kepada *maqashid syari'ah* yaitu *hifz al-Mal* (menjaga harta). Dan dari *maqashid syari'ah* inilah nantinya akan

---

<sup>96</sup>Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. III, No. 2264 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 99.

<sup>97</sup>Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh Wa Khalāsah al-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996), h. 108.

menimbulkan kemaslahatan *syari'iyah islamiyyah*. Sekiranya seorang muslim tidak memakan harta saudaranya dengan cara kebatilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q. S Al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...”*<sup>98</sup>

Karena pada dasarnya hutang piutang akadnya saja sudah dalam bentuk tolong-menolong, Semestinya membawa kemaslahatan bagi pihak yang diberi pertolongan dalam bentuk hutang piutang. Meskipun hutang piutang dibolehkan dalam Islam dan bukanlah termasuk ke dalam hal yang tercela, tetap harus dapat menggunakannya secara bijak.

Berdasarkan berbagai ulasan di atas tersebut bahwa hutang piutang dalam Islam merupakan hal yang hukumnya *mubah* (boleh). Selama tidak terdapat sesuatu yang mengharamkannya. Sedangkan dalam pengembalian hutang hewan ternak dengan nilai yang berbeda, hendaknya kita merujuk kepada pendapat yang lebih kuat seperti salah satu pendapat di atas tersebut yang mana pengembalian hutangnya lebih menitik beratkan kepada kemaslahatan kedua pihak. Untuk nominal hutangnya jika tidak ada

tambahan yang dipersyaratkan di awal maka pengembalian hutang itu tidak termasuk riba, namun jika tambahan tersebut sudah dipersyaratkan sejak awal maka termasuk riba.

Menurut permasalahan yang terjadi pengembalian hutang harus merujuk pada perubahan nilai yang ada, jika pengembalian hutang seperti itu tidak menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat sah-sah saja. Karena sesuatu yang tidak dipersyaratkan di awal akad namun sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tetap dihitung sebagai syarat. Pengembalian hutang yang merujuk pada kebiasaan yang sudah ditetapkan tidaklah dibolehkan karena termasuk dalam kategori dipersyaratkan.

Pengembalian hutang hewan ternak dengan nilai yang berbeda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, menurut pandangan hukum Islam dibolehkan selama tidak dipersyaratkan pada awal akad dan bukan menjadi adat kebiasaan setempat. Karena perbedaan nilai yang terjadi bukanlah atas kelalaian salah satu pihak, dan atas dasar pengembalian obyek hutang yang lebih baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda yang terjadi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara bahwa transaksi hutang hewan tersebut berlangsung pada tahun 2000 dengan objek hutang yaitu sapi yang pada tahun itu nominal harga/nilainya sebesar Rp.5.000.000., yang akan dikembalikan setelah 17 tahun kemudian, dalam melewati beberapa tahun tersebut maka berubahlah harga/nilai pada obyek hutang yang semula pada akad tahun 2000 senilai Rp. 5.000.000., dan saat akan dikembalikan pada tahun 2017 senilai Rp. 10.000.000., jika pengembalian hutang hewan sapi merujuk pada nilai yang berlaku maka diperbolehkan hal ini sejalan dengan pernyataan Ibn Qayim Al-Jauziah bahwa “perubahan fatwa hukum dan perbedaannya itu disebabkan karena perubahan situasi, kondisi, niat dan tradisi”
2. Menurut hukum Islam transaksi hutang hewan sapi dianggap sah karena syarat serta rukun secara fikih muamalah sudah terpenuhi. Pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda, yang pada awal akad tahun

2000 obyek hutang yaitu sapi senilai Rp. 5.000.000., dan dikembalikan pada tahun 2017 yang nilainya sudah berubah menjadi Rp. 10.000.000., menurut pendapat ketiga yang merupakan keputusan Al Majma' Al-Fiqhiy Al Islami (divisi rabithah alam Islam) mengatakan bahwa penurunan daya beli uang bukan karena kelalaian *muqridh* atau keduanya. Jadi, apabila dalam pengembalian hutang hewan sapi dengan nilai yang berbeda maka dianggap sah karena perbedaan nilai bukan karena kelalaian salah satu pihak melainkan atas dasar pengembalian obyek hutang yang lebih baik.

## **B. Saran**

Saran-saran ditujukan kepada:

1. Sebagai seorang muslim hendaknya dalam bermuamalah dalam bidang apapun tetap menjadikan norma serta aturan yang telah digariskan dalam Islam digunakan sebagai acuannya atau petunjuknya. Maka bagi pihak pemberi hutang (*muqridh*) untuk tidak merujuk pembayaran hutang pada waktu atau perubahan nilai karena menyebabkan ketidakjelasan nominal yang harus dibayarkan, hendaknya dalam perjanjian disebutkan nominal serta waktu secara jelas untuk proses pembayaran dan membiasakan untuk menggunakan perjanjian tertulis untuk menghindari kesalah pahaman. Karena hutang piutang keutamaanya merupakan tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan.
2. Hendaknya para tokoh agama dan ulama setempat selalu memberikan pengetahuan serta pendidikan kepada masyarakat tentang agama secara

konkrit dan jelas sehingga diharapkan transaksi pengembalian hutang semacam ini akan semakin berkurang.

3. Dalam pengembalian hutang hewan ternak sebaiknya dilakukan secara musyawarah apabila perjanjian atau akad awal hutang masih belum menemui titik temu, maka bermusyawarahlah antar kedua pihak.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Kitab Shahih Muslim*, Jilid IV, Penerjemah: Abd. Rasyid Shiddiq dkk (Semarang: CV Asy Syifa, 1992)
- Arby, Suharyanto, Hukum Hutang dalam Islam dan Dalilnya (On-line), tersedia di: <https://Hukum-Hutang-Piutang-dalam-Islam-dan-Dalilnya-DalamIslam.com> (1 November 2018), Diakses 10 Maret 2019 Pukul 08:58 WIB.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Ibn Muhammad, *Al-Lakmi Al-Muwaffaqat Fi Usul Al-Ahkam*, Jilid ke 1 dan 2, T.tp: Dar Al-Fikr, t.t.
- Ath-Thayyar , Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ahmad Az-Zarqa, Mustofa, *Al-Fiqh Al-Islami Fi Tsaubil Al-Jadid Al-Madkhah Al-Fiqhi Al Am*, Juz ke 2, Damaskus: Matba'ah Tarbain, 1968.
- Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: PT Kalim, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Klaten: Riels Grafika, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Erwandi, Tarmisi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Mulia Berkat Insani, 2018.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*, Malang: CV Andi Offset,

- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Bayan*, Jakarta: Sa'diyah Pustaka, t.tahun.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016.
- Ibn Qayyim Aj-Jausiyyah, *I'lam Al-Muwagghi'im 'An Rabb Al-Alamin*, Cetakan ke 1, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2004.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015.
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr A-suyuti As-Syafi'I, *Al-Asybah Wa An-Nadza'ir Fi Al-Furu'*, Surabaya Indonesia: Muhammad bin Ahmad bin Nahkam Wa Auladah, t.tahun.
- K.Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, Jilid III Penerjemah Zainuddin Hamidy dkk Jakarta: PT Bumi Restu, 1992.
- Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Dhah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah*, Bairut: Mu'assasah Ar- Risalah, 1983.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nur Baits, Ammi, *Pengantar Fiqh Jual Beli*, Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2016.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Ramdansyah, Abdul Aziz, Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam, dalam *Jurnal Bisnis & Manajemen Islam*, Vol. 4. No. 1 (Juni 2016), (Kudus: STAIN Gajah Putih Takengon, 2016), (On-line), tersedia di <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689> (16 November 2018), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusfi, Muhammad, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 1 (Juni 2014), (Bandar Lampung: Fakultas

Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), (On-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175> (3 maret 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Balai Pustaka, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

Shohib, Muhammad, Sikap Terhadap Uang dan Perilaku Berhutang, *Jurnal Ilmiah dan Terapan*, Vol. 03 No. 01 (Januari 2015), (Malang: Universitas of Muhammadiyah Malang, 2015), (On-line), tersedia di <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/2133> (1 November 2108) , dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Supramono dan Nancy Putlia, Persepsi dan Faktor Psikologis dalam Pengambilan Keputusan Hutang, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14 No. 01 (Januari 2010), (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, 2010), (On-line), tersedia di <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/947> (6 Maret 2019) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Permatanet, 2014.

Syafe'i ,Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tahido, Yanggo, Huzaimah, *Masa'il Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005.

Tuasikal, Muhammad Abduh, *Panduan Fiqh Muamalah "Taubat dari Hutang Riba dan Solusinya"*, Yogyakarta: CV Rumaysho, 2017

Usman Tsubair, Muhammad, *Al-Madkhal ila Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyyah*, Yordania: Dar An-Nafais, 2004.